



UKI PRESS  
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL &  
CALL FOR PAPERS**  
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS  
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI  
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018  
Auditorium Griha William Soeryadjaya  
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

# PROSIDING

## “REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

### Susunan Panitia

#### Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA  
*(Rektor UKI)*  
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

#### SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung  
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA  
*Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)*  
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.  
*Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)*  
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.  
*Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)*

#### Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K  
*Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya*

#### Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

#### Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

#### Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

#### Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M  
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

#### Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th  
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

#### Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.  
Dr. Demsi Jura, M.Th.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

#### Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

#### Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th  
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,  
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsy Jura, M.Th.

# **PROSIDING**

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN  
BERDASARKAN PANCASILA”**

## **Reviewer:**

Dr. Demsey Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

## **Editor:**

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsey Jura, M.Th.

**ISBN: 978-979-8148-96-5**

Penerbit  
UKI Press  
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630  
Telp.(021)8092425, [ukipress@uki.ac.id](mailto:ukipress@uki.ac.id)  
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
<b>Keynote Speakers</b>		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
<b>Speakers</b>		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
<b>Pemakalah</b>		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiory (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksin (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demsy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255



## **Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter**

**Rm. Benny Susetyo**

Penguatan Pancasila perlu diselenggarakan dengan membumikan Pancasila melalui gerakan aktualisasi nilai-nilai dan pembudayaan karakter Pancasila. Sebab Pancasila merupakan silang pertemuan ide dan gagasan dari ragam ideologi dan agama yang hidup di Indonesia. Pancasila dimaknai sebagai muara antara kekuatan nasionalisme sekuler dan Islam. Pancasila diterima menjadi jalan tengah segala kepentingan. Ketuhanan yang Maha Esa dimaknai sebagai titik temu spiritual dari semua keyakinan. Rumusan sila pertama ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang melepaskan agama dari kehidupan politik. Sebab dalam makna tertentu dimensi religiusitas agama-agama justru merasuk dalam kehidupan politik bernegara. Pada sisi lain, Indonesia juga bukan negara agama, karena tidak menjadikan agama tertentu sebagai konstitusi dan hukum positif.

Keyakinan ini membawa akibat bahwa sejatinya setiap rakyat melaksanakan harmoni dengan memupuk rasa persaudaraan dan ikatan persatuan antar semua golongan untuk membangun Indonesia yang maju dan beradab. Dalam praktik riil di tengah konteks masyarakat masih sering muncul sikap arogan, superior, rasial, dengan mengkotak-kotakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahkan dalam relasi sosial di masyarakat, sering dijumpai kekerasan dan pertikaian yang disebabkan perbedaan identitas, yang akhir-akhir ini dirasakan menguat berkaitan mobilisasi dukungan politik dalam pilkada maupun pemilu.

Dalam konteks ini menjadi penting dan mendesak untuk mengaktualisasi nilai keutamaan dari Pancasila. Utamanya mendaraskan semangat untuk menghapus cara pandang dan sikap rasial yang memandang rendah kelompok lainnya atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan supaya sungguh bisa dihilangkan. Semua agama mengajarkan etika sosial tentang sikap egaliter, menempatkan manusia pada posisi setara, sama, dan memiliki harkat dan martabat yang sama. Segala tindakan diskriminatif harus dihapuskan. Setiap agama pastinya memberikan jaminan moral untuk membangun masyarakat yang egaliter. Inilah jalan membumikan Pancasila.

Untuk itu kita perlu membangun gerakan membumikan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Sebagai bangsa berketuhanan, mestinya segala tindakan harus didasarkan pada etika dan keadaban demi menjunjung tinggi semangat humanisme universal yang sudah dijamin dalam Konstitusi dan Undang-Undang. Jamak dipahami, setiap agama sejatinya bisa dijadikan landasan moral etis dalam membangun kembali interaksi sosial yang beradab. Menjadi manusia seutuhnya bukan semata menjadi baik secara personal melainkan mampu memberikan harapan kepada masyarakat umum untuk membangun Indonesia yang damai dan bermartabat.

Meskipun Konstitusi, Undang-Undang Dasar negara kita sejak Proklamasi Kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan amandemen, namun

Pembukaan UUD 1945 sudah menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus disusun berdasarkan Pancasila, dengan lima nilai dasar yang saling kait-mengkait. Pengejawantahan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini hanya dapat dilaksanakan apabila ada ketaatan dari setiap warga negara. Ketaatan kenegaraan ini berpusat pada keteladanan dan semangat para penyelenggara negara.

Dibutuhkan tekad dan kesungguhan mendagingkan Pancasila dalam setiap penyelenggaraan negara, utamanya ketaatan hukum dalam pembuatan dan pelaksanaan setiap undang-undang dan peraturan mulai dari pusat sampai ke daerah. Semuanya itu harus *in-line* dengan lima sila dalam Pancasila. Pembumian Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara harus dilakukan dengan mengukuhkan posisi Pancasila sebagai dasar falsafah negara, terus mengembangkan diskursus ilmiah, menegaskan konsistensinya dengan produk perundang-undangan, menjaga koherensi antara kelima sila, konsisten membaca tanda-tanda zaman dan perubahan realitas sosial dengan komitmen bersama. Selanjutnya kita akan sampai pada pembudayaan Pancasila.

### ***Pembudayaan Pancasila***

Pembudayaan Pancasila sebagai ideologi nasional bersifat imperatif. Artinya semua komponen bangsa, utamanya para pemegang jabatan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, lembaga negara, di semua tingkatan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat ini. Demi menjaga pertahanan negara, menegakkan ideologi negara, berjalannya sistem ketatanegaraan, pemerintah punya kewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional kepada generasi penerus demi mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran, konsep, dan operasionalisasi pembudayaan nilai-nilai dasar negara harus dikembangkan secara melembaga, konsepsional, dan fungsional oleh negara (pemerintah) dengan mendayagunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa.

Pembudayaan Pancasila akan memperkuat daya tahan bernegara sehingga bisa mewujudkan pertahanan nasional yang kuat. Pembudayaan Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi modal mental menghadapi krisis multidimensi nasional yang bersumber dari pudarnya sendi sosial-budaya bangsa. Pancasila sebagai ideologi bernegara harus dipijakkan membumi sebagai nilai-nilai hidup yang dihidupi masyarakat sehari-hari. Hal ini dirasakan semakin jauh dari harapan. Pemerintah perlu membuat terobosan merumuskan gerakan pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada segenap lapisan generasi di masyarakat, melalui gerakan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia.

Untuk mewujudkan itu, secara mendasar dan mendesak negara/pemerintah punya kewajiban membenahi konten pendidikan nasional sebagai medium pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Bagi masyarakat umum terutama para kader ormas dan parpol serta aparatur negara, harus menjadi motor utama gerakan ini. Lembaga nasional, kementerian dan lembaga negara non kementerian, harus diwajibkan melaksanakan program pembudayaan nilai-nilai Pancasila ini, secara internal kelembagaan maupun dikelola lintas kelembagaan. Harapannya kelembagaan tersebut supaya mantap mental sehingga mampu secara representatif

tampil menjadi teladan nilai ber-Pancasila dalam tugasnya melayani publik. Teladan penyelenggara negara ini sentral bagi gerakan membangun panutan berperilaku/bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Pembudayaan Pancasila lewat teladan para penyelenggara negara ini dapat meningkatkan kesadaran bangsa sebagai benteng wawasan nasional dan garda terdepan ketahanan nasional yang kuat secara berkesinambungan.

Pembudayaan menuntut kerja dan pemaknaan yang lebih tinggi daripada pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kerja mensosialisasikan nilai-nilai yang perlu diketahui kepada seluruh warga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus pula mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Sedangkan pembudayaan boleh dibilang punya pemaknaan lebih maju lagi karena disertai dorongan memberikan motivasi. Kerja dalam pembudayaan lebih maju karena melibatkan lebih banyak dimensi kognitif dan afektif. Bahkan orientasi kerja pembudayaan menyangkut pula pelembagaan di masyarakat. Pembudayaan Pancasila menuntut peningkatan kualitatif, sehingga mencakup pengertian yang tidak sekadar memahami, tapi harus sampai pada tingkatan menghayati dan mewujudkan dalam pengamalan sikap dan tindakan nyata di tengah masyarakat. Dalam kerja pembudayaan menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan, mempertajam perasaan, meningkatkan daya tahan, daya tangkal, yang tercermin dalam tanggap dan perilaku sosial. Dengan begitu pembudayaan Pancasila menjadi kerja bersama mengusahakan agar nilai dan normanya menjadi budaya yang hidup dan dihidupi di tengah masyarakat luas.

Pembudayaan karakter bangsa yang bersumber dari mata air nilai-nilai luhur Pancasila. Diharapkan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sebagai benteng penangkal degradasi kebangsaan dan kenegaraan yang kita rasakan dewasa ini. Gagasan mewujudkan pembudayaan Pancasila sepatutnya dikembangkan secara melembaga, konsepsional, dan fungsional oleh negara dengan mendayagunakan semua lembaga dan komponen bangsa. Semua komponen bangsa bersama pemerintah dan lembaga tinggi negara berkewajiban membendung tantangan kebangsaan dan kenegaraan menghadapi globalisasi-liberalisasi di era *post-truth* hari ini. Kita punya tugas bersama menyelamatkan masa depan kebangsaan dan kenegaraan dengan kembali pada Pancasila sebagai mata air kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari karakter bangsa, berarti kita berbicara tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam tiga praksis berikut. Pertama, sebagai gagasan nilai dan norma. Kedua, sebagai pola tindakan dalam aktivitas warga. Ketiga, sebagai wujud hasil cipta manusia dalam kerja kebudayaan.

Secara mendasar dan mendesak negara wajib meningkatkan pendidikan nasional sebagai lembaga formal mewujudkan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Inilah momentum kerja untuk merevitalisasi pendidikan moral Pancasila di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan melalui pendidikan kewargaan (*civic education*) dalam kurikulum pendidikan nasional terintegrasi. Berikut ini prinsip pokok dari lima sila tersebut yang harus menjadi pegangan dan penuntun.

Pertama - **Ketuhanan yang Berkebudayaan:** 1) Kerangka Ketuhanan lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi,

dalam kehidupan publik menghormati nilai-nilai Ketuhanan-Keagamaan; 2) Diferensiasi fungsi antara institusi agama dan negara, agama mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat (*civil society*) yang beradab; negara mengembangkan tatanan kehidupan negara (*political society*) yang beradab; 3) Sila Ketuhanan memberikan dimensi agama pada kehidupan politik. Demokrasi yang berketuhanan, kita memerlukan agama yang menghormati demokrasi, dan kita memerlukan demokrasi yang menghargai agama. Kehidupan publik (politik) berdasarkan moralitas Ketuhanan dalam semangat gotong-royong mencapai kerangka titik-temu lintas agama, tanpa membawa tirani agama, tanpa menjadikan salah satu agama mendikte kebijakan pemerintah/negara; 4) Nilai Ketuhanan diharapkan memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri membangun bangsa; 5) Indonesia "bukan negara agama, bukan negara sekuler", fundamentalisme agama dan fundamentalisme sekuler harus dihindari, keduanya membuat Ketuhanan dan politik saling mengucilkan dan saling mengalahkan, serta menjadikan politik tanpa jiwa.

**Kedua - Kemanusiaan Universal:** 1) Prinsip ini mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal (humanity). Prinsip "kesamaan" kemanusiaan antar bangsa, kesederajatan antarbangsa, egalitarianisme antarumat manusia. Jiwa dari sila Kemanusiaan adalah prinsip kesamaan dan kesederajatan dalam hubungan antarmanusia dan antarbangsa; 2) Sila 2 ke dalam: pedoman negara untuk memuliakan kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menjalankan fungsi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa"; 3) Sila 2 ke luar: pedoman negara untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam kerangka "ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"; 4) Dalam serbuan globalisasi modern mengandung imperatif etis bagi penegakan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan global. Dalam kemajuan sains dan teknologi memerlukan visi dan komitmen yang berpihak pada prinsip keadilan sosial, melalui implementasi sikap empati, solidaritas, dan kepedulian; 5) Pancasila seharusnya dijadikan sebagai prinsip pemberadaban dan menjadi panduan bagi proses pengadaban (*civilizing process*) untuk manusia dan bangsa Indonesia.

**Ketiga - Persatuan dalam Kebhinnekaan:** 1) Meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia; mengekspresikan persatuan dalam keragaman (*unity in diversity*), dan keragaman dalam persatuan (*diversity in unity*), sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika; 2) Proses "*nation building*" merupakan agenda penting yang harus terus dibina dan ditumbuhkan, bahwa "rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa". Kebangsaan Indonesia adalah satu tubuh (bangsa Indonesia) dengan banyak kaki (suku bangsa). Bangsa Indonesia banyak kakinya, yang tetap dipertahankan untuk memperkokoh rumah kebangsaan (keindonesiaan). Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan Indonesia; 3) Negara persatuan Indonesia merupakan ekspresi dan pendorong semangat "gotong-royong" sebagai paham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", negara yang mampu memberikan "kebaikan

bersama" bagi warganya, dengan terus mengembangkan "pendidikan kewargaan" (*civic education*) dan multikulturalisme serta dilandasi prinsip-prinsip partisipatif dan non-diskriminatif; 4) Penguatan nasionalisme politik juga memerlukan kesetaraan kesempatan, interaksi sosial dan partisipasi publik, ruang publik harus bisa diakses oleh orang dari latar agama dan etnis apa pun, sebagai wahana penyerbukan silang budaya dan memperkuat budaya kewargaan (*civic culture*); 5) Indonesia bukan hanya suatu "nation" (bangsa), melainkan juga suatu "notion" (pengertian), bahwa ia menyatakan suatu tujuan politik. Tarikan ke arah demokratisasi menguat, tetapi tolakan oposisi dan antagonisme terhadapnya juga terjadi. Di seluruh dunia, saat ini "politik identitas" yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif mengalami gelombang pasang.

Keempat - **Demokrasi Permusyawaratan:** 1) Demokrasi Indonesia membawa kepribadian Indonesia sendiri, dalam konteks keindonesiaan. Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekadar alat teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian, dan cita-cita nasional. Demokrasi kita hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat), dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan), (3) hikmat-kebijaksanaan; 2) Cita-cita kerakyatan = menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah; 3) Cita-cita permusyawaratan = kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya "kesederajatan/persamaan dalam perbedaan"; 4) Cita-cita hikmat-kebijaksanaan = merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan; 5) Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat: (1) harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. (2) didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. (3) berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). (4) bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Kelima - **Keadilan Sosial:** 1) Prinsip kesejahteraan, mengadakan persamaan di atas lapangan ekonomi, kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Tekad yang kuat untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial di seberang jembatan emas kemerdekaan. Titik tumpu ekonomi dipercayakan kepada sosialisme yang bersendikan semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan kreatif individu. Sosialisme Indonesia menjunjung tinggi asas persamaan dan kebebasan individu, yang mengedepankan tanggung jawab dan solidaritas sosial bagi kebajikan kolektif; 2) Para pendiri bangsa mengemukakan, "Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan

keadilan". "Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi" (Soekarno). Prinsip menghadirkan keadilan bernegara dan negara yang berkeadilan mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi di bidang politik yang berkelindan dengan emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi; 3) Indonesia dikehendaki sebagai "negara kesejahteraan" (negara sosial), bukan "negara liberal". Negara kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penjelasan UUD 1945 Pasal 33 antara lain berbunyi: "Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang!" Keadilan sosial melalui perwujudan negara kesejahteraan merupakan imperatif etis dari amanat Pancasila dan UUD 1945; 4) Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka: (1) Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan), (2) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, (3) Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumberdaya yang diperlukan, dan (4) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang; 5) Sistem ekonomi Pancasila: menekankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berorientasi kerakyatan (publik secara keseluruhan), dengan bersendikan nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sokoguru perekonomian merealisasikan sistem ekonomi Pancasila adalah prinsip "gotong-royong" ("koperasi").

Pembudayaan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa dan lembaga negara. Generasi muda harus menjadi fokus karena masa depan merupakan tanggung jawabnya. Orang muda harus terdepan memperkokoh karakter dan jati diri bangsa diarahkan pada pembangunan jati diri Indonesia. Pembudayaan Pancasila ini di kalangan warga negara utamanya generasi muda harus dilakukan melalui pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling bekerjasama dan bekerja bersama.